BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan serangkaian kebijakan dan usaha guna bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan mengarahkan distribusi pendapatan yang merata. Pembangunan ekonomi merupakan keinginan yang diharapkan oleh setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Di negara berkembang, dengan berfokus pada berbagai hal terutama terkait dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, menciptakan struktur perekonomian yang seimbang serta pemerataan pembangunan ekonomi (Sukirno, 1994). Pertambahan penduduk di Indonesia menjadi masalah tersendiri dalam proses pemerataan pembangunan ekonomi di berbagai sektor seperti ketersediaan lapangan kerja yang belum terpenuhi serta minimnya kesempatan kerja (Rahmawati, 2013). Perluasan permintaan tenaga kerja diperlukan untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk yang masuk dalam pasar tenaga kerja, apabila keseimbangan tersebut tidak tercipta maka menyebabkan meningkatkan pengangguran dan berpengaruh besar terhadap proses yang dilakukan pada pembangunan ekonomi dengan jangka yang panjang (Depnakertrans, 2004).

Menurut UU No. 13 Tahun 2013, Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk

memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Tenaga kerja dapat juga diartikan sebagai penduduk yang berada dalam batas usia kerja. Beberapa kebijakan telah dibuat seperti kebijakan ekonomi dalam menyelesaikan permasalahan terkait pengangguran serta melakukan penyerapan tenaga kerja secara maksimal oleh pemerintah serta meningkatkan proses industrialisasi (Arifin & Kuncoro, 2003). Banyaknya permintaan tenaga kerja oleh suatu sektor perekonomian dapat digunakan untuk menggambarkan proporsi pekerja yang mampu dimanfaatkan dan sebagai tolak ukur struktur perekonomian suatu wilayah. Secara umum kondisi ketenagakerjaan di Indonesia menunjukan perkembangan yang menjadi permasalahan pokok yang mampu menghambat pembangunan ekonomi. Ketidakseimbangan antara percepatan pertambahan jumlah angkatan kerja dengan pertumbuhan jumlah kesempatan kerja yang tersedia di tiap daerah menyebabkan peningkatan pengangguran**.** Berikut merupakan contoh permintaan tenaga kerja yang tidak seimbang di suatu daerah.

Grafik 1. 1

Tingkat Partisipasi Angkatan kerja, Bekerja dan Pengangguran

di Provinsi Jawa Timur tahun 2013 - 2018

(Dalam Persen)

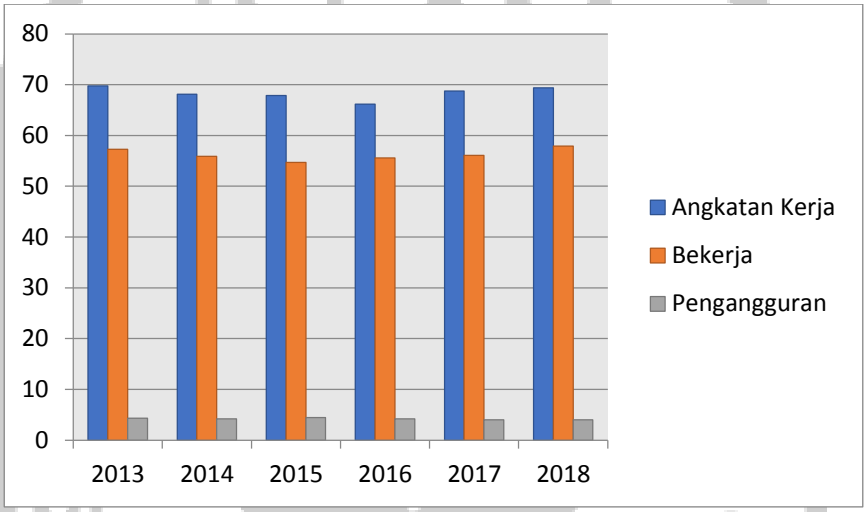

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2018

Pada grafik 1.1 merupakan contoh yang menunjukan tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat presentase pekerja dan pengangguran di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 sampai dengan 2018. Dari tabel diatas menunjukan bahwa terdapat kenaikan yang signifikan pada tingkat angkatan kerja serta terdapat fluktuasi kenaikan pada tingkat pekerja. Artinya terjadi proses permintaan tenaga kerja oleh pengusaha atau industri di Provinsi Jawa Timur, walaupun tenaga kerja yang digunakan belum maksimal dan angka pada pengangguran masih terus mengalami peningkatan bersamaan dengan peningkatan jumlah angkatan kerja yang selalu meningkat ditiap tahunnya. Dengan adanya peningkatan tersebut diharapkan terdapat tambahan jumlah lapangan pekerjaan sehingga mampu menambah penyerapan tenaga kerja dan

meningkatkan output Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Peningkatan ini akan lebih baik apabila terdapat peningkatan jumlah pada lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja sehingga meningkatkan output Provinsi Jawa Timur maupun nasional.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki 38 kabupaten dan kota. Provinsi ini juga memliki kontribusi dan potensi besar bagi perekonomian di Indonesia, berdasarkan Badan Pusat Statistika (BPS) Jawa timur tahun 2016 jumlah penduduk sebanyak 39.075.152 dengan laju pertumbuhan sebesar 0.56 % artinya Provinsi Jawa Timur memiliki sumber daya manusia yang melimpah sehingga mampu berpengaruh terhadap peningkatan pembangunan ekonomi baik bagi provinsi maupun nasional. Selain sumber daya manusia yang melimpah, Provinsi Jawa Timur juga merupakan daerah Industri unggulan di Indonesia yang memiliki berbagai macam sektor industri didalamnya. Pengembangan industri merupakan salah satu cara untuk memperluas kesempatan kerja dengan adanya lapangan kerja yang tersedia.

Grafik 1. 2

Jumlah Industri besar dan sedang di Provinsi Jawa Timur tahun 2013 – 2018

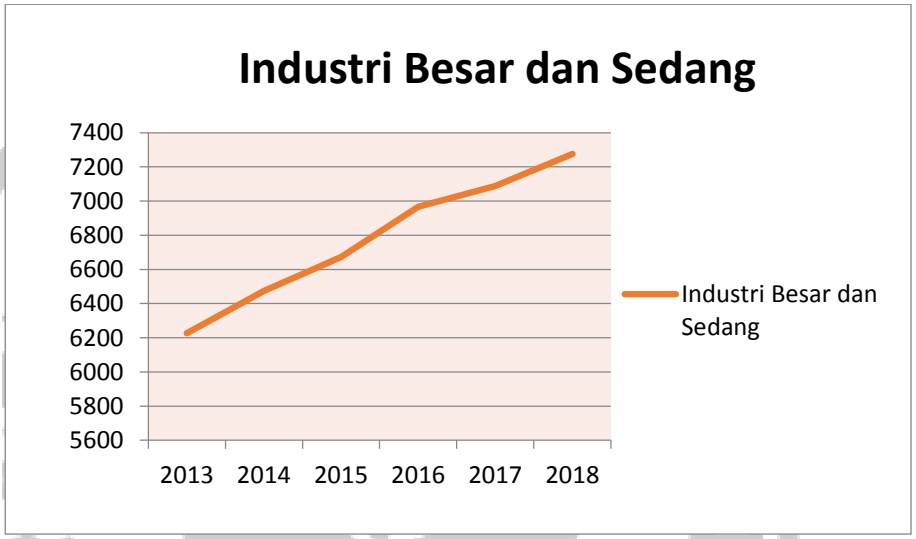

Sumber : BPS Jawa Timur, 2018

Pada grafik 1.2 diatas menunjukan jumlah industri besar dan sedang yang berada di Provinsi Jawa Timur. Grafik diatas menunjukan secara garis besar, industri besar dan sedang sangat mempengaruhi pasar tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja yang optimal mampu mewujudkan tujuan dalam pembangunan ekonomi baik secara regional maupun nasinal melalui lapangan pekerjaan yang tersedia. Industri memiliki banyak peran terkait dengan permintaan tenaga kerja. Menurut Badan Pusat Statistika, Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi industri terbesar nomor empat yang ada di Indonesia, diantara provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta serta Jawa tengah. Beberapa Kabupaten/Kota yang menjadi indutri unggulan di Provinsi Jawa Timur antara lain Surabaya, Pasuruan, Mojokerto, Sidoarjo serta Gresik. Industri yang dimiliki beberapa wilayah Kabupaten/Kota bergerak dalam bidang pengolahan makanan, otomotif dan

bahan kimia. Jumlah industri yang terus bertambah menimbulkan kapasitas produksi yang meningkat sehingga berpengaruh pada investasi pemerintah hingga PDRB yang diperoleh wilayah tersebut (Izmei, 2015).

Grafik 1.3

Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Timur tahun 2013 – 2018

(Dalam Persen)

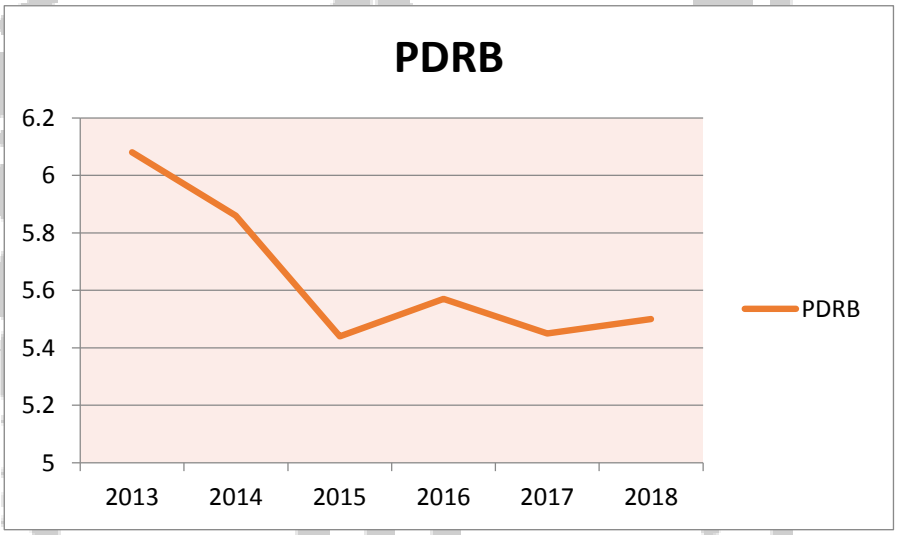

Sumber : BPS Jawa Timur, 2018

Berdasarkan grafik 1.3 diatas terlihat bahwa PDRB provinsi Jawa Timur mengalami flutuasi pada setiap tahunnya. Artinya, pertumbuhan ekonomi masih mengalami berbagai perubahan terkait peluang pekerjaan maupun usaha yang tesebar. PDRB juga dapat menggambarkan kemampuan suatu wilayah daerah dalam mengelola sumber daya alam, melalui PDRB dalam harga berlaku dapat dilihat bahwa jumlah produktivitas suatu wilayah mampu menunjukkan tingkat perolehan pendapatan suatu daerah, tingkat pemanfaatan tenaga kerja serta peningkatan konsumsi sehingga mampu mempengaruhi permintaan tenaga kerja.

Dalam hal pengelolaan sumber daya alam, diperlukan kemampuan yang berkualitas pada sumber daya manusia guna mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi dan faktor – faktor yang mempengaruhi kesejahteraan suatu daerah terutama di Provinsi Jawa Timur. pencapaian pembangunan manusia dijadikan tolak ukur dalam tercapainya tujuan tersebut. Tingkat pembangunan manusia yang rendah dapat berpengaruh pada kemiskinan yang apabila dilihat dari sudut pandang ekonomi dapat menghasilkan sumber daya manusia yang kurang berkualitas atau dapat dikatakan kurang memiliki tingkat produktivitas yang tinggi. Hal ini dapat berimbas pada terbatasnya kesempatan kerja hingga minimnya upah yang diperoleh. Menurut Badan Pusat Statistika (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur salah satu aspek yang berkaitan dengan kualitas dari hasil – hasil pembangunan ekonomi yaitu derajat perkembangan manusia. IPM memiliki tiga indikator yakni kesehatan, pendidikan yang dicapai dan standar kehidupan.

Grafik 1. 4

Tingkat Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur tahun 2013 – 2018
(Dalam Persen)

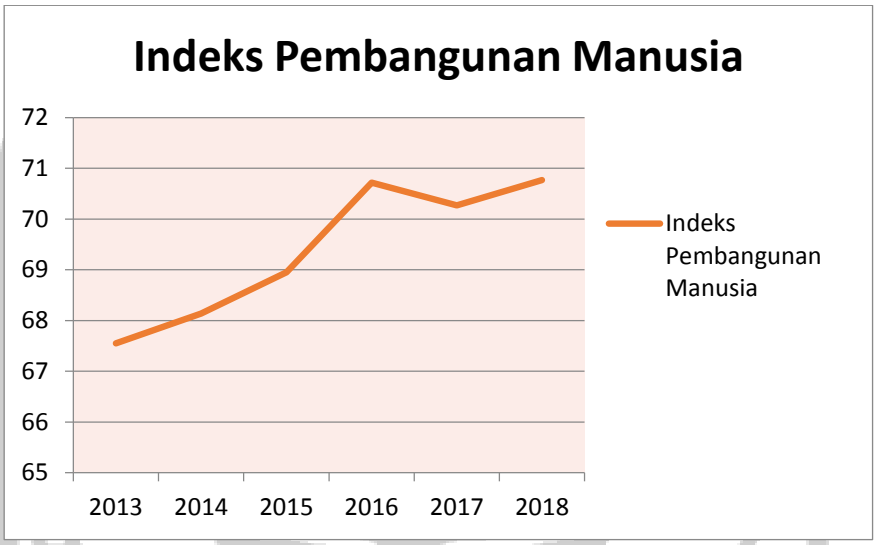

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2018

Grafik 1.4 menunjukan tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 hingga tahun 2018. Tingkat IPM mengalami kenaikan pada tiap tahunnya namun kenaikan tersebut tidak mencapai lebih dari 2% artinya Provinsi Jawa Timur belum mampu menunjukan progres peningkatan pada beberapa indikator yang ada didalamnya yaitu tingkat kesehatan, pendidikan dan standar kehidupan. Peran sumber daya manusia sebagai tenaga kerja mampu memberikan pengaruh dalam pembangunan ekonomi baik dalam sektor formal maupun informal. Semakin tingginya pembangunan ekonomi, maka akan meningkatkan permintaan tenaga kerja yang didorong oleh kegiatan ekonomi sebelumnya. (Feriyanto, 2014).

Selain itu, peningkatan kualitas terhadap tenaga kerja dengan memberikan upah minimum agar mampu memberikan jaminan terhadap tenaga kerja untuk memperoleh upah yang layak perlu diperhatikan, sejar akhir tahun 1980an tingkat upah minimum mengalami kenaikan dengan cepat sehingga telah mencapai titik dimana upah minimum menjadi tingkat upah yang berlaku bagi sebagian besar pekerja, mengingat besarnya jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Kondisi yang demikian akan menjadi masalah jika tidak didukung oleh perekonomian yang kuat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk penyediaan kesempatan kerja (Simanjutak, 1985).

Grafik 1.5

Rata – rata Jumlah Upah Minimum Provinsi di Jawa Timur tahun 2013 -2018
(Satuan Rupiah)

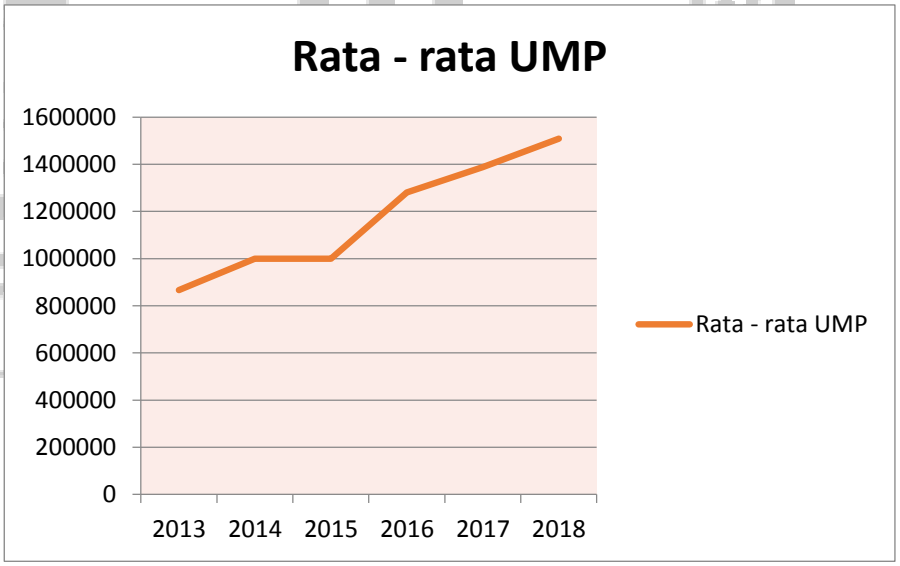

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2018

Grafik 1. 5 menunjukan rata – rata jumlah Upah Minimum Provinsi (UMP) di Jawa Timur yang memiliki 38 Kabupaten /Kota. Upah Minimum Provinsi diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat atau tenaga kerja yang berada di jawa Timur mengingat besarnya jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk yang berada di wilayah tersebut.

Dari berbagai permasalahan – permasalahan yang dipaparkan, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terkait beberapa indikator yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja seperti jumlah industri, jumlah PDRB, tingkat IPM dan jumlah upah yang berlaku. Dari latar belakang dan berbagai permasalahan – permasalahan yang dipaparkan pada beberapa indikator seperti jumlah industri, jumlah PDRB dan jumlah upah minimum terus mengalami peningkatan, namun selama ini peran indikator – indikator tersebut belum mampu memberikan pengaruh terhadap penurunan tingkat pengangguran di provinsi Jawa Timur. penulis mengadakan penelitian terkait analisis seberapa besar pengaruh faktor – faktor permintaan tenaga kerja di Jawa Timur pada tahun 2013 sampai dengan 2018, dengan judul "**Permintaan Tenaga Kerja Di Sektor Industri Provinsi Jawa Timur tahun 2013 – 2018**".

1.2 Rumusan Masalah

Terkait latar belakang yang telah dijelaskan, penulis mampu mengambil beberapa rumusan masalah pada penelitian, yaitu :

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis membuat beberapa rumusan masalah penelitian, diantaranya adalah :

1. Bagaimana pengaruh jumlah industri besar dan sedang terhadap Permintaan Kerja di Provinsi Jawa Timur ?
2. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap Permintaan Kerja di Provinsi Jawa Timur ?
3. Bagaimana pengaruh tingkat IPM terhadap Permintaan Kerja di Provinsi Jawa Timur ?
4. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Permintaan Kerja di Provinsi Jawa Timur ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh jumlah industri besar dan sedang terhadap Permintaan Kerja di Provinsi Jawa Timur.
2. Menganalisis pengaruh PDRB terhadap Permintaan Kerja di Provinsi Jawa Timur.
3. Menganalisis pengaruh tingkat Indeks Pembangunan Manusia terhadap Permintaan Kerja di Provinsi Jawa Timur.
4. Menganalisis pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Permintaan Kerja di Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang diambil, penulis berharap mampu memberi manfaat, sebagai berikut :

1. Bagi Penulis, diharapkan mampu memberikan ilmu, pengetahuan maupun pengalaman melalui sistem dan cara penulisan karya ilmiah dan memberikan pengalaman terkait wawasan secara menyeluruh dan mendalam tentang keadaan permintaan tenaga kerja di Jawa Timur.
1. Bagi Pemerintah, dengan dijadikan bahan argumen maupun pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan ataupun mengenai permasalahan permintaan tenaga kerja khususnya di Jawa Timur.
2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi bagi penelitian yang akan dilakukan pada periode berikutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang masing – masing dijelaskan secara singkat.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

1. Kajian Pustaka

   Berisi tentang pendokumentasian dan pengkajian hasil dari penelitian – penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan topik yang

sama. Hal ini penting dilakukan untuk menunjukkan bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki arti penting sehingga diketahui kontribusi penelitian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan maupun empiris.

2. Landasan Teori

   Berisi tentang teori yang digunakan dalam mendekati permasalahan yang akan diteliti. Landasan teori ini harus memberikan diskusi yang lengkap mengenai hubungan antar variable yang terlibat.

3. Hipotesis Penelitian

   Dipandang sebagai jawaban sementara atau rumusan masalah, sehingga hipotesis yang disusun merupakan pernyataan yang menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, identifikasi, perumusan model analisis, atau metode analisis.

BAB IV. HASIL, ANALISIS DATA PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai deskripsi data, penguji hipotesis atau hipotesis yang dibuat, pembahasan, serta penelitian dari pengujian tersebut.

BAB V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh pelaksanaan penelitian, keterbatasan dan saran bagi penelitian selanjutnya.